



Available online at **HISTORIA**; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah
Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia>



RESEARCH ARTICLE

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI PADA ERA HU JINTAO

Nina Arsy Putri Jadmiko, R. Tuty Nur Mutia

Program Studi Cina, FIB, Universitas Indonesia

Correspondence Author: ninarsya.pj@gmail.com

To cite this article: Jadmiko, N. A. P., & Mutia, R.T.N. (2024). Upaya pemberantasan korupsi pada era hu intau. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 7(2), 209-224. <https://doi.org/10.17509/historia.v7i2.75315>.

Naskah diterima : 18 Oktober 2023, Naskah direvisi : 7 Juni 2024, Naskah disetujui : 30 Oktober 2024

Abstract

Corruption is literally defined as the embezzlement or misuse of state, company, organization, foundation, and other money for personal or other people's interests. It is a serious problem for countries worldwide, including China. Corruption in China has been recorded since the dynasty era and has continued to develop into modern times, especially after the start of the gaige-kaifang (reform & opening) era. Since its founding in 1949, the People's Republic of China (PRC) has tried to eradicate corruption. Entering the 21st century, science and technology have developed rapidly. Hu Jintao, who led China in the early 21st century (2002-2013), utilized advances in science and technology to eradicate corruption. That is the subject of this article. The research method used is qualitative with a historical science approach, including the stages of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The study results show that the use of science and technology, especially the use of the Internet to eradicate corruption in China in the Hu Jintao era, brought significant results compared to the previous government era. This success also increased public satisfaction with the effectiveness of efforts to eradicate corruption in China.

Keywords: *Corruption eradication; gaige-kaifang; Hu Jintao; science and technology.*

Abstrak

Korupsi secara harfiah didefinisikan sebagai sebuah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan sebuah masalah serius bagi negara-negara di dunia, termasuk Tiongkok. Korupsi di Tiongkok sudah tercatat sejak era kedinastian dan terus berkembang hingga zaman modern, terutama setelah dimulainya era gaige-kaifang (reformasi-keterbukaan). Sejak berdiri pada tahun 1949 hingga saat ini, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah banyak melakukan upaya pemberantasan korupsi. Memasuki abad-21 ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berkembang pesat. Hu Jintao yang memimpin RRT pada awal abad-21 (2002-2013) memanfaatkan kemajuan iptek untuk memberantas korupsi. Hal itulah yang menjadi pokok bahasan artikel ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah yang mencakup tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan iptek, terutama pemanfaatan internet untuk pemberantasan korupsi di Tiongkok pada era Hu Jintao membawa hasil yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya. Keberhasilan tersebut juga telah meningkatkan kepuasan rakyat terhadap efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Tiongkok.

Kata Kunci: *Gaige-kaifang; Hu Jintao; ilmu pengetahuan dan teknologi; pemberantasan korupsi.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan sebuah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain (KBBI, 2020). Dalam kamus besar bahasa Cina-Indonesia, korupsi disebut sebagai 腐败 *Fǔbài*, 腐 *Fǔ* yang berarti busuk dan 败 *bài* berarti rusak atau membusuk. Wu yang berarti busuk dan *bài* berarti rusak atau membusuk. Wu (2016) menjelaskan bahwa korupsi secara umum dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik atau posisi di pemerintahan untuk mengamankan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan publik. Selama ratusan bahkan ribuan tahun, korupsi telah menjadi sebuah masalah serius bagi negara-negara di dunia, tidak terkecuali Tiongkok. Hal ini karena tindak korupsi bersifat merugikan dan dapat mengancam sistem pemerintahan bahkan kedaulatan suatu negara.

Praktik tindak korupsi di Tiongkok telah berlangsung sejak zaman kedinastian dan terus berkembang di seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah hingga saat ini (D'Amico, 2015). Di Tiongkok, tindakan yang termasuk tindak korupsi adalah penyuapan atau *Huìlù* (贿赂), penggelapan atau *Tānwū* (贪污), nepotisme atau *xúnsī wǔbì* (徇私舞弊), penyelewengan atau *nuóyòng gōngkuǎn* (挪用公款), pengabaian tugas atau *wànhū zhìshǒu* (玩忽职守), penghindaran pajak atau *tōushuì lòushuì* (偷税漏税), penyalahgunaan kekuasaan atau *làn yòng zhíquán* (滥用职权), dan lain-lain (Ko & Weng, 2012). Menurut Wedeman (2004) tingkat korupsi di Tiongkok era moderen mulai meningkat setelah dimulainya reformasi dan keterbukaan pada tahun 1978-1979, lalu menjadi semakin merebak pada tahun 1980-an, dan konstan di angka yang tinggi pada tahun 1990-an. Bentuk tindak korupsi yang paling umum terjadi di Tiongkok adalah tindakan penyuapan serta tindakan pemberian hadiah yang banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat dan terkonsentrasi di proyek infrastruktur, penjualan hak pengguna tanah, pengadaan pemerintah, hukum dan pengadilan, jasa keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya, Pei (2007) juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi di Tiongkok, yaitu adanya reformasi ekonomi, kegagalan pemerintah mengadopsi reformasi politik, dan lemahnya upaya penegakan hukum oleh pemerintah serta rendahnya tingkat deteksi tindak korupsi. Selain itu, keserakahan manusia, lemahnya masyarakat sipil, faktor historis dan tradisi budaya seperti *guanxi* (关系) juga menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi di Tiongkok.

Sejak diproklamirkan pada tahun 1949 pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah menerapkan berbagai macam upaya untuk mencegah, mengontrol, dan memberantas tindak korupsi dan bergerak semakin aktif tahun 1990-an hingga tahun 2000-an (Ko & Weng, 2012). Tang, Ding, dan Xu (2018) membagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tiongkok pada periode 1950-2000-an menjadi tiga bagian besar, yaitu 1) upaya pemberantasan korupsi melalui kampanye dan gerakan-gerakan sosial pada era pemerintahan Mao Zedong dan Deng Xiaoping di tahun 1950-an-1980-an, 2) upaya pemberantasan korupsi melalui kelembagaan dan sistem hukum pada akhir pemerintahan Deng Xiaoping dan era pemerintahan Jiang Zemin di tahun 1990-an, dan 3) upaya pemberantasan korupsi melalui platform media baru pada era pemerintahan Hu Jintao sejak tahun 2000-an.

Hu Jintao merupakan pemimpin Tiongkok di awal abad-21. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok pada 2002-2012 dan Presiden Tiongkok pada 2003-2013. Hu Jintao, selama karirnya, telah banyak menyoroti bahaya ancaman korupsi dan menerapkan cara yang berbeda pada upaya pemberantasan korupsi (Ewing, 2003). Dalam pidatonya, Hu Jintao seringkali menekankan betapa seriusnya bahaya korupsi bagi partai dan juga negara. Menurut Hu Jintao, jika korupsi tidak segera diatasi dengan baik maka akan dapat menyebabkan runtuhnya partai dan negara. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan salah satu tugas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga rakyat (Xu, 2008). Salah satu upaya pemberantasan korupsi yang diterapkan pada masa pemerintahan Hu Jintao adalah upaya pemberantasan korupsi dengan memanfaatkan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi (selanjutnya akan disebut dengan iptek), yaitu melalui media baru seperti komputer, internet, dan situs web sebagai sarana edukasi dan pengawasan terhadap tindak korupsi yang terjadi di Tiongkok.

Kajian mengenai upaya pemberantasan korupsi yang diterapkan pada era Hu Jintao pernah dilakukan oleh Xu Senlin 徐森林 (2008) dalam artikelnya yang berjudul 胡锦涛反腐败思想探析 *Hújǐntāo Fǎn Fǔbài Sīxiǎng Tànxī* atau Analisis Pemikiran Antikorupsi Hu Jintao. Xu memaparkan bahwa Hu Jintao sangat memahami ancaman bahaya korupsi dan menekankan pentingnya sikap anti-korupsi. Menurut Xu, korupsi merupakan fenomena sosial dan sejarah yang sangat sulit diberantas dalam jangka waktu singkat di Tiongkok. Selanjutnya, Xu menjelaskan mengenai langkah-langkah

utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di era Hu Jintao.

Wan Bibo 万碧波 dan Cai Jing 蔡静 (2010) dalam artikelnya yang berjudul 胡锦涛反腐倡廉思想简论 *Hújǐntāo Fǎnfǔ Chàng Lián Sixiǎng Jiǎn Lùn* atau Analisis Singkat Pemikiran Hu Jintao dalam Memerangi Korupsi dan Membangun Pemerintahan yang Bersih menyebutkan bahwa Hu Jintao banyak mengembangkan teori dan pemikiran pemimpin terdahulu menjadi sebuah inovasi baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Wan dan Cai juga menyebutkan mengenai isi utama serta ciri-ciri pemikiran Hu Jintao dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu ilmiah, sistematis, inovatif, dan daya tempur.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai upaya pemberantasan korupsi pada era Hu Jintao dalam kedua kajian tersebut hanya dilakukan secara umum. Pembahasan keduanya lebih bersifat konseptual dengan berlandaskan kepada gagasan-gagasan Hu Jintao tentang pemberantasan korupsi. Tidak membahas secara rinci bagaimana implementasi dan dampaknya. Pemanfaatan iptek dalam pemberantasan korupsi merupakan hal menarik untuk dibahas lebih lanjut, hal itulah yang menjadi pokok bahasan artikel ini. Pertanyaan penelitian yang diajukan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah 1) bagaimana perkembangan tindak korupsi di Tiongkok? 2) Mengapa pada era reformasi-keterbukaan masalah pemberantasan korupsi semakin mendapat perhatian? 3) Bagaimana efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi di era Hu Jintao? Tiga pertanyaan penelitian tersebut menjadi panduan untuk menganalisis perkembangan bentuk tindak korupsi yang ada di Tiongkok dan penerapan upaya pemberantasan korupsi pada era Hu Jintao serta efektivitas dari upaya tersebut.

METODE

Dalam memaparkan upaya pemberantasan korupsi pada era Hu Jintao, artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis. Empat tahapan penelitian yang dicakup dalam pendekatan historis adalah, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, sumber primer yang digunakan berupa Pidato Hu Jintao dalam Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-17 tahun 2007 (胡锦涛在中国共产党第十七次全国代表大会上的讲话 *Hújǐntāo Zài Zhōngguó Gòngchǎndǎng Dì Shíqī Cì Quánguó Dàibǎo Dàhuì de Jiǎnghuà*) dan pada Sidang Pleno Komisi Pusat Inspeksi Disiplin ke-17 Partai Komunis Tiongkok (中国共产党第十七届中央纪律

检查委员会全体会议 *Zhōngguó Gòngchǎndǎng Dì Shíqī Jiè Zhōngyāng Jǐlǜ Jiǎnchá Wěiyuánhui Quántǐ Huìyì*). Sedangkan sumber sekunder berupa e-books dan artikel jurnal yang didapatkan dan diunduh dari www.jstor.org, www.cnki.com.cn, www.cambridge.org, dan lain-lain digunakan sebagai data pendukung dalam proses verifikasi dan interpretasi. Tahap terakhir adalah historiografi yang memaparkan hasil analisis bagaimana penerapan upaya pemberantasan korupsi dan efektivitas kebijakan pada era Hu Jintao.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Korupsi di Tiongkok

Praktik tindak korupsi di Tiongkok sudah tercatat sejak masa dinasti Shang (1600-1046 SM) dan terus berkembang pada dinasti-dinasti selanjutnya (Fang & Li, 2019). Bentuk tindak korupsi yang terjadi pada era kedinastian kebanyakan berupa tindak pengambilan uang rakyat oleh aparat pemerintah yang kemudian digunakan untuk membangun properti pribadi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengangkat kerabat terdekat menjadi pejabat berpangkat tinggi (nepotisme). Salah satu contoh tindakan nepotisme tersebut adalah yang dilakukan oleh Huo Guang, seorang jenderal besar Dinasti Han (206 SM-8M). Saat itu Huo menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan para kerabat dekatnya sebagai pejabat pemerintahan (Fang & Li, 2019).

Korupsi yang terjadi pada masa pemerintahan Dinasti Qing (1644-1912), terutama pada era akhir kedinastian merupakan fenomena tindak korupsi yang paling parah dibandingkan dengan masa pemerintahan dinasti-dinasti sebelumnya. Hal itu dapat dibuktikan melalui banyaknya karya sastra, catatan pribadi, dan dokumen pemerintah yang mencatat tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat Dinasti Qing. Salah satu catatan yang mengungkapkan tindak korupsi pada masa Dinasti Qing adalah catatan milik Sun Yat Sen pada tahun 1897. Fang dan Li (2019) menjelaskan bahwa, menurut Sun Yat Sen praktik korupsi pada era akhir kedinastian adalah berbentuk “陋规鄙习 *lougui bixi* atau praktik korupsi dan adat kebiasaan yang buruk” seperti “门包 *menbao* atau biaya masuk”, yaitu tindakan membayar atau memberi hadiah untuk menyuap penjaga pintu agar diperbolehkan masuk. *Menbao* merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh para pejabat, khususnya pejabat lokal di berbagai daerah pada masa Dinasti Qing. Selain itu, tindakan berupa penerimaan suap berupa hadiah, penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, dan penggunaan uang rakyat untuk keuntungan pribadi juga merupakan tindakan yang umum dilakukan pada akhir masa Dinasti Qing.

Maraknya fenomena tindak korupsi pada saat itu disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi dalam negeri Tiongkok dan lemahnya kontrol pemerintah pusat akibat Perang Candu pada 1842 dan masuknya invasi asing ke Tiongkok. Para pejabat tingkat atas memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berlomba-lomba memperkaya diri sedangkan para pejabat bawah harus mematuhi atasan mereka dengan membayar atau memberi hadiah agar mendapatkan perlindungan dan posisi yang aman dalam pemerintahan.

Selain itu, faktor budaya berupa *guanxi* juga menjadi salah satu penyebab maraknya fenomena korupsi pada saat itu. *Guanxi* berarti “hubungan”. Lee (2017) berpendapat bahwa dalam budaya Tiongkok, *guanxi* mengacu pada konsep hubungan sosial, seperti ikatan keluarga dan kekerabatan. Sedangkan menurut Yeung dan Teung (1996) *guanxi* mengacu pada hubungan pribadi antara seseorang dengan orang lain atau, dalam kasus ini, pejabat pemerintah yang tepat untuk menjalankan transaksi pribadi atau sosial yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, sifat *guanxi* yang saling menguntungkan tersebut sering disalahgunakan oleh para pengusaha dan pejabat pemerintahan sebagai media untuk melakukan tindak korupsi. Para pengusaha memberikan hadiah dan jamuan makan kepada pejabat untuk meningkatkan hubungan sosial sekaligus agar bisnis mereka mendapatkan perlindungan (Lee, 2017).

Pada masa Tiongkok modern, sejak awal tahun 1926 masalah korupsi mulai kembali muncul di birokrasi partai dan lembaga pemerintahan. Tindakan seperti penyelundupan, penyuapan, penggunaan dana publik untuk keuntungan pribadi, umum dilakukan pada masa tersebut. Menurut Wu dan Liu (2011) Mao Zedong sering melakukan pembersihan anggota partai untuk memberantas tindak korupsi yang terjadi terutama dalam tubuh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Mao Zedong juga menggunakan cara pengawasan demokratis dan mendirikan komite serta lembaga pengawasan baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kota dan kabupaten sebagai upaya pemberantasan korupsi (Wu & Liu, 2011; Wang, 2004).

Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, korupsi kembali mewabah. Wu dan Liu (2011) menyebutkan bahwa sejumlah besar masalah korupsi, pemborosan, dan birokrasi di partai dan lembaga pemerintah terungkap. Tindak korupsi yang banyak terjadi pada era pemerintan Mao Zedong adalah jenis tindak korupsi implisit, yaitu sebuah tindakan di mana para pejabat yang diangkat dalam

pemerintahan merupakan orang-orang yang memiliki hak istimewa dan menggunakan hak istimewa tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri (Yao, 2002). Orang-orang yang memiliki hak istimewa tersebut biasanya merupakan anak atau kerabat dekat dari para pemimpin partai yang kemudian menduduki posisi dalam pemerintahan.

Menyikapi hal tersebut, Mao Zedong sebagai pemimpin PKT (1949-1976) kemudian menyatakan perlunya sikap anti-korupsi dan banyak mengemukakan ide untuk pemberantasan korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi yang diterapkan pada masa pemerintahan Mao adalah pembentukan Komite Pusat Inspeksi Disiplin (中央纪律检查委员会 *Zhōngyāng Jìlǜ Jiǎnchá Wěiyuánhui*) untuk mengawasi pemerintahan. Mao juga banyak melakukan gerakan kampanye untuk memberantas korupsi. Misalnya, pada tahun 1951 diberlakukan Gerakan Tiga Anti (三反运动 *Sān Fǎn Yùndòng*) yang sasarannya adalah tindak korupsi, pemborosan, dan birokratisme. Pada tahun berikutnya diberlakukan Gerakan Lima Anti (五反运动 *Wǔ Fǎn Yùndòng*) yang sasarannya adalah tindak korupsi, penyuapan, penggelapan pajak, pembocoran rahasia negara, dan penggelapan kontrak pemerintah (Li, 2019). Chen dan Chen (1955) kembali menunjukkan bahwa berdasarkan laporan Bo Yibo, seorang Menteri Keuangan dan Ketua Panitia Pengawas Barang dan Produksi, Gerakan Tiga Anti telah berhasil mengungkap 1670 kasus pelanggaran di 27 departemen pusat setelah satu bulan diterapkan. Kemudian pada bulan Oktober 1952, Gerakan Tiga Anti telah mengungkap 100.000 pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, di mana 9.942 orang di antaranya dijatuhi hukuman penjara, 67 orang dijatuhi hukuman seumur hidup, dan 56 orang dijatuhi hukuman mati (Yang, 2019). Dua pejabat tinggi yang dijatuhi hukuman mati di antaranya adalah Liu Qingshan dan Zhang Zishang yang melakukan korupsi dengan menyalahgunakan posisi mereka dalam pemerintahan serta menggunakan dana dan fasilitas rakyat untuk mengais keuntungan pribadi.

Laporan Bo Yibo juga menyatakan bahwa Gerakan Lima Anti berhasil menemukan 76% dari 450.000 pedagang dan industrialis melakukan tindakan yang berlawanan dengan Lima Anti. Yang (2019) dan Chen & Chen (1955) dalam artikelnya juga memaparkan bahwa kedua gerakan tersebut berhasil mengkonsolidasi kontrol PKT atas bisnis-bisnis pribadi yang terdapat di Tiongkok sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan pengawasan. Meskipun demikian, Mao Zedong melalui upaya-upayanya masih belum berhasil memberantas secara tuntas korupsi di Tiongkok.

2. Korupsi di Tiongkok Pada Era Reformasi dan Keterbukaan

Kembalinya Deng Xiaoping ke kursi pemerintahan pasca Revolusi Kebudayaan dan menjadi bagian dari pimpinan PKT (1978-1992) merupakan era baru bagi Tiongkok. Pada tahun 1978, Deng Xiaoping mencanangkan diberlakukannya program reformasi-keterbukaan (改革开放 *Gǎigé kāifàng*) menuju Tiongkok yang menerapkan sistem ekonomi pasar. Slater (2020) menyebutkan bahwa reformasi-keterbukaan dimulai dengan diberlakukannya kebijakan pintu terbuka untuk menarik investasi asing dan penanaman modal asing di Tiongkok serta dibukanya empat zona ekonomi khusus di Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen.

Adanya perubahan beberapa kebijakan dan kondisi pada saat itu, seperti dibebaskannya rakyat untuk mengatur dan menjalankan usahanya sendiri kemudian menyebabkan terjadinya *cultural shock* atau 'gegar budaya'. Terjadinya hal itu terutama karena berubahnya pola hidup dari serba diatur dan tergantung pada pemerintah atau serba bersama, menjadi lebih longgar dan didorong untuk mandiri, tentu tidak semua orang dapat menjalaninya dengan baik. Menjalani hidup dengan budaya 'bersaing' bagi sejumlah orang juga bukan merupakan hal mudah. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada mulai meningkat dan berkembang pesatnya tingkat korupsi di Tiongkok. Pada era itu, banyak terjadi apa yang disebut oleh Yao (2002) bentuk korupsi eksplisit. Berbeda dengan korupsi implisit pada era pemerintahan Mao Zedong di mana para pejabat yang diangkat merupakan orang-orang yang memiliki hak istimewa, korupsi eksplisit adalah bentuk penyuapan dan penyogokan yang dilakukan oleh para pejabat tinggi pemerintahan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi, dan agar bisnis pribadi milik mereka semakin lancar.

Deng, Zhang, dan Leverentz (2010) membagi tindak korupsi yang terjadi sejak dimulainya reformasi-keterbukaan hingga tahun 2000-an menjadi empat gelombang, yaitu 1) gelombang korupsi pertama pada tahun 1979-awal tahun 1980-an, 2) gelombang korupsi kedua pada tahun 1980-an, 3) gelombang korupsi ketiga pada awal tahun 1990-pertengahan tahun 1990-an, dan 4) gelombang korupsi keempat pada akhir 1990-an-tahun 2008.

Ketika awal dimulainya reformasi-keterbukaan, Tiongkok masih berada dalam tahap baru lepas dari sistem komune dan mulai menerapkan sistem ekonomi pasar. Proses produksi yang sebelumnya hanya dapat ditentukan oleh pemerintah pusat secara bertahap dilonggarkan dengan diberlakukannya sistem

desentralisasi dan program *Xiàhǎi* (下海) atau turun ke lautan. Para pejabat dan produsen lokal diizinkan untuk mengambil keputusan dan melakukan proses produksi mereka sendiri, asalkan tetap memenuhi kuota produksi negara dan mempertahankan aspek dasar dari ekonomi terpusat (Deng, et al., 2010). Hal tersebut merujuk pada diberlakukannya sistem jalur ganda dalam perekonomian Tiongkok, di mana perencanaan pusat berjalan bersamaan dengan sistem ekonomi yang berorientasi pasar. Wu (2003) mengungkapkan bahwa sistem jalur ganda menyebabkan suatu produk memiliki sistem harga ganda yang memungkinkan suatu produk mempunyai dua harga, yaitu harga yang dikendalikan oleh negara dan harga pasaran yang besarnya hanya bisa ditentukan oleh pejabat yang berwenang (Deng, et al., 2010).

Kurangnya kontrol regulasi dari pemerintah pusat kemudian membuka celah bagi para produsen dan pejabat lokal untuk melakukan tindak korupsi. Menurut Gong (2007), pada saat itu para produsen kerap kali menyuap pejabat yang berwenang untuk mengatur harga produk, terutama produk bahan mentah, agar mendapatkan harga serendah mungkin, kemudian menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh para pejabat, khususnya mereka yang berwenang dalam menetapkan kuota produksi dan kuota impor, sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri. Kondisi Tiongkok yang banyak mengimpor barang buatan luar negeri pada awal tahun 1980-an juga dimanfaatkan para pejabat terutama untuk melakukan kegiatan penyelundupan barang guna menghindari pajak barang impor yang tinggi (Hao & Johnston, 1995)

Tindak penyuapan dan penyelundupan barang di Tiongkok terus meningkat hingga gelombang korupsi kedua pada tahun 1980-an. Pada pertengahan tahun 1980-an, jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat senior meningkat hingga 2.500 kasus dan kerugian yang berhasil dipulihkan sebanyak 1.700 dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar 10.931 Yuan per kasus (Wedeman, 2012). Menurut Hu (1989), pada gelombang kedua, produk yang menjadi sasaran sistem harga ganda tidak lagi berupa produk bahan mentah biasa, tetapi berupa produk komoditas yang dikuasai oleh negara seperti batu bara, baja, kayu, dan semen (Deng, et al., 2010).

Wang (2004) menyebutkan bahwa sejak tahun 1982, Deng Xiaoping telah memahami bahwa diberlakukannya reformasi-keterbukaan serta diterapkannya sistem harga ganda telah menyebabkan banyak kader partai yang terlibat dalam tindak korupsi. Oleh karena itu, Deng

kemudian mengusulkan untuk berhenti menggunakan kampanye sebagai upaya pemberantasan korupsi dan mulai menerapkan upaya pemberantasan korupsi yang mengandalkan sistem hukum (Wang, 2004). Tiongkok kemudian mendirikan lembaga audit, meningkatkan sistem konstruksi pemerintahan yang antikorupsi dan bersih, serta merumuskan dan memperketat sejumlah peraturan perundang-undangan seperti hukum pidana, hukum acara pidana, dan lain-lain sebagai upaya pemberantasan korupsi (Wu & Liu, 2011). Sistem harga ganda tidak dapat dipertahankan terus, pemerintah pusat kemudian secara signifikan mengurangi jumlah komoditas yang harganya dikendalikan oleh negara (Gong, 1999). Wedeman (2012) mengatakan bahwa upaya yang telah dilakukan Deng Xiaoping berhasil meningkatkan pelaporan jumlah kasus tindak korupsi kepada kejaksaan Tiongkok, yaitu dari 9.000 kasus pada tahun 1980 menjadi 77.400 kasus pada tahun 1989.

Memasuki tahun 1990-an, angka korupsi di Tiongkok semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya perkembangan perekonomian. Menurut Fang dan Li (2019) perkembangan ekonomi yang tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik membuat korupsi di Tiongkok pada saat itu telah mencapai level mengkhawatirkan, karena telah merebak di seluruh lapisan industri dan pemerintahan Tiongkok. White (1996) juga menyebutkan bahwa pada akhir tahun 1993, wakil jaksa agung Lian Guoqing mengakui bahwa korupsi yang terjadi pada saat itu jauh lebih parah daripada era-era sebelumnya sejak kemerdekaan Tiongkok tahun 1949. Rata-rata dana yang dikorupsi oleh para pejabat pada tahun 1990-an mencapai angka 250.000 dolar AS atau sekitar 1.607.000 Yuan, lima puluh kali lebih banyak dari rata-rata dana yang dikorupsi pada tahun 1980-an (Sun, 2005). Hao dan Johnston (1995) menambahkan bahwa selama periode lima tahun 1988-1993, komite inspeksi disiplin di berbagai tingkatan menyelidiki lebih dari 870.000 pelanggaran, dengan 730.000 anggota partai didisiplinkan dan 150.000 orang dikeluarkan. Tingginya tingkat korupsi di Tiongkok pada saat itu membuat Tiongkok menempati urutan keempat negara paling korup di dunia menurut data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) milik *Transparency International* (TI) pada tahun 1995. Meisner (1996) mengungkapkan bahwa tingkat korupsi yang parah ini merupakan “akibat yang tidak diinginkan” dari reformasi ekonomi Deng Xiaoping (Feng & Li, 2019).

Tindakan penyuapan, penyelundupan, penggelapan, dan nepotisme masih menjadi bentuk utama tindak korupsi pada gelombang ketiga tersebut. Bentuk-bentuk utama dilakukan dengan skala kasus yang jauh lebih

besar, yaitu sekitar 100.000 hingga 1.000.000 yuan. Hal itu berbeda dengan ketika awal 1980-an, di mana suap dan penggelapan biasanya berkisar antara beberapa ratus hingga beberapa ribu yuan (Hao & Johnston, 1995). Kasus skala besar ini biasanya dilakukan oleh para pejabat pemerintahan senior yang saling bekerja sama menyalahgunakan posisi mereka dalam pemerintahan untuk mendapatkan berbagai keuntungan pribadi. He (2000) memaparkan bahwa “Gong Hui” (工会) merupakan bentuk korupsi baru yang populer saat itu. “Gong Hui” merupakan bentuk tindakan penyuapan pejabat publik oleh pejabat publik lainnya untuk melancarkan pemasaran produk mereka, menghindari peraturan dan pajak pemerintah, dan mendapatkan perlakuan istimewa dalam pemerintahan.

Menurut Sun (2005) pada tahun 1990-an banyak pejabat yang melakukan tindak penyuapan dalam skala yang lebih besar untuk berbagai barang padat modal seperti tanah, hak milik, dana investasi, saham dan aset BUMN, keringanan pajak, dan lain-lain. Gong (1997) menjelaskan bahwa para pejabat kembali menggunakan guanxi untuk mendapatkan akses formulir pasar saham sehingga dapat menghasilkan keuntungan hingga jutaan yuan tanpa mengeluarkan modal sedikit pun. Salah satu kasus yang cukup besar saat itu adalah kasus Shenzhen tahun 1992, di mana lebih dari 4000 pejabat kota terlibat dalam tindakan penyuapan untuk mendapatkan formulir aplikasi saham (Gong, 1997).

Korupsi di lembaga keuangan semakin merajalela di gelombang korupsi keempat pada akhir tahun 1990-an hingga tahun 2008. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah pusat terutama terhadap lembaga keuangan. Banyak pejabat berpangkat tinggi yang terlibat tindakan penyuapan dalam lembaga keuangan, yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Beberapa pejabat tinggi dalam lembaga keuangan yang terlibat tindak penyuapan hingga jutaan dolar AS pada saat itu di antaranya Jin Derqin (2000), Zhu Xiaohua (1997-1999), Li Jinbao (2005), Wang Xuebing (2003), dan Zhang Enzhao (2005) (Deng, et al., 2010).

Pada periode itu, terdapat dua bidang baru yang menjadi sasaran para pejabat untuk melakukan tindak korupsi, yaitu bidang jual-beli dan sewa tanah serta bidang transportasi negara yang pada saat itu menerapkan sistem kepemilikan lahan ganda. Deng, et.al. (2010) berpendapat bahwa para pejabat yang memiliki hak untuk memperoleh tanah dari petani dengan harga rendah sering menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendapatkan suapan dari para *developer* yang menginginkan tanah tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah. Hal yang sama juga terjadi

di bidang transportasi, terutama dalam pembangunan jalan raya. Para kontraktor berlomba-lomba menyuap pejabat yang memiliki wewenang dalam sebuah proyek agar mendapatkan bocoran informasi mengenai proyek tersebut sehingga dapat dipilih untuk berpartisipasi dalam proyek dan mendapatkan keuntungan yang besar. Jiang Zemin (1993-2003) sebagai penerus Deng Xiaoping berulang kali menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan memberantas hingga ke akar penyebabnya melalui pendidikan, penguatan sistem tata kelola partai, dan penguatan sistem hukum yang berlaku (Wang, 2004). Selama tahun 1993 hingga tahun 2000, serangkaian peraturan perundang-undangan telah disusun untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih. Komite Sentral Partai juga telah membentuk departemen anti korupsi dan penyuaan, departemen anti-penyimpangan dan pelanggaran, dan departemen pencegahan kejahatan tugas di organ kejaksaan (Wu & Liu, 2011).

Upaya pemberantasan korupsi yang diterapkan oleh Jiang Zemin telah berhasil mengungkap beberapa korupsi skala besar. Contohnya kasus penyuaan yang dilakukan oleh mantan anggota Biro Politik Komite Chen Xitong, penggelapan oleh pemilik salah satu pabrik rokok paling populer di Tiongkok, penyuaan oleh wakil gubernur provinsi Jiangxi, kasus penyelundupan di pelabuhan Xiamen, dan penyalahgunaan dana publik serta perdagangan uang dan kekuasaan yang dilakukan oleh mantan wakil direktur Komisi Ekonomi Provinsi Shaanxi Yang Feng dan mantan direktur Komisi Ekonomi Provinsi Shaanxi Zhao Jingzhang. Yang (2019) dan Wedeman (2012) juga menambahkan bahwa sepanjang tahun 1990-an dan awal 2000-an rata-rata kasus tindak korupsi berkisar antara 48.000 hingga 60.000 kasus.

Meskipun demikian, hanya 1.520 orang yang diberi hukuman disiplin partai dan hanya 78 pejabat senior dan junior di tingkat provinsi dan menteri yang diselidiki, dituntut, dan bahkan dieksekusi (Yang, 2019; Keliher & Wu, 2016). Indeks Persepsi Korupsi milik *Transparency International* menunjukkan bahwa sejak tahun 1995 hingga akhir 1990-an tingkat korupsi di Tiongkok masih berada di rata-rata yang berkisar pada angka 30-35, yang berarti bahwa tingkat korupsi sangat tinggi (Zhu, 2017). He (2000) juga menyebutkan bahwa masyarakat dan para pejabat lainnya masih sangat tidak puas dengan upaya pemberantasan korupsi yang diterapkan pada saat itu. Dalam sesi Kongres Rakyat Nasional tahun 1997, total jumlah 40% suara dari deputi menentang laporan kerja tahunan Jaksa Agung Zhang Siqing (He, 2000).

3. Pemberantasan Korupsi di Tiongkok pada Awal Abad-21 (Era Hu Jintao)

Tingkat tindak korupsi yang masih tinggi di Tiongkok pada akhir 1990-an menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang diterapkan oleh Jiang Zemin belum efektif untuk memberantas secara tuntas korupsi yang terjadi di Tiongkok. Terdapat banyak faktor mengapa upaya pemberantasan yang diterapkan masih belum efektif. Salah satu faktornya adalah tidak adanya ketegasan dan transparansi pemerintah dalam mengatasi kasus korupsi. Menurut Yang (2019) korupsi yang terjadi pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an marak dilakukan terutama oleh para pejabat-pejabat tinggi dan senior partai. Pejabat tersebut memiliki kuasa dan dapat menggunakan kuasa mereka untuk menuntut balik ketika dilaporkan. Chan, Dang, dan Li (2019) menambahkan bahwa berbeda dengan tindak kejahatan seperti perampokan atau penculikan, banyak korban juga tidak menyadari jika dirinya dirugikan oleh tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Fenomena tersebut membuat pemerintah pusat gamang untuk mengambil langkah dalam menanggapi peristiwa yang sedang terjadi. Mengekspos seluruh kasus korupsi yang ada berarti menunjukkan bahwa sistem partai tidak bekerja secara maksimal. Hal tersebut dapat membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada partai sehingga berbahaya bagi legitimasi Partai Komunis Tiongkok.

Pei (2007) berpendapat bahwa setiap tahunnya hanya 80% dari total 130.000-190.000 anggota partai yang diberi peringatan karena melakukan tindak korupsi, 20% di antaranya dikeluarkan dari partai, dan hanya 6% yang mendapatkan hukuman berupa dipenjara atau diberi hukuman mati. Adanya ketidaktegasan pemerintah dalam menghukum para koruptor kemudian memunculkan kecenderungan para koruptor untuk melarikan diri ke luar negeri membawa uang hasil suap serta penggelapan. Huang (2006) menyebutkan bahwa berdasarkan sumber resmi, pada tahun 1997-1999 jumlah uang yang dibawa melarikan diri oleh para koruptor mencapai jumlah sekitar 53 miliar dolar AS. Jumlah tersebut meningkat menjadi 139 miliar antara tahun 2000 dan 2001.

Menurut surat kabar yang dikontrol Beijing di Hong Kong, Wen Wei Po, dalam enam bulan pertama tahun 2003, terdapat 8.371 anggota dan kader partai yang melarikan diri ke luar negeri (Huang, 2006). Lam (2006) memaparkan bahwa para ahli asal Tiongkok memperkirakan pada awal tahun 2000-an, kerugian ekonomi akibat korupsi mencapai 14,9% dari PDB Tiongkok atau sekitar 181 milyar dolar AS. Tingginya

angka kerugian ekonomi tersebut membuat korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar pada era pemerintahan Hu Jintao. Berbagai upaya diterapkan Hu untuk memberantas korupsi. Sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di awal abad ke-21, Hu Jintao menetapkan salah satu kebijakan utamanya adalah memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (pemikiran ilmiah) dalam pembangunan. Secara spesifik pemerintahan Hu kemudian juga memanfaatkan kemajuan TIK dalam upaya memberantas korupsi. Paparan selanjutnya akan menguraikan bagaimana proses kebijakan pemanfaatan iptek atau tepatnya TIK dalam pemberantasan korupsi di Tiongkok pada era pemerintahan Hu Jintao, sehingga mampu membawa hasil yang cukup signifikan.

3.1. Gagasan Pemanfaatan IPTEK dalam Pemberantasan Korupsi

Menurut Xu (2008) Hu Jintao menyadari bahwa pemberantasan korupsi merupakan sebuah rangkaian jangka panjang dan kompleks. Oleh karena itu, sejak Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-16 pada tahun 2002, Hu Jintao banyak menekankan pentingnya pemberantasan korupsi (Fewsmith 2016; Wan & Cai, 2010). Lam (2006) menambahkan bahwa pada pertengahan tahun 2003, Hu dalam pidato di sidang Komite Sentral menyebutkan mengenai pemerintahan yang bersih dan mengancam mengenai kasus korupsi yang terjadi di kalangan pejabat, termasuk pejabat senior dan menengah.

Gagasan pemberantasan korupsi di era pemerintahan Hu Jintao didasari oleh empat pemikiran atau konsep dasar yaitu, Pemikiran pemberantasan korupsi Marxisme-Leninisme, Pemikiran Mao Zedong (毛泽东思想 *Máo zédōng Sīxiǎng*), Teori Deng Xiaoping (邓小平理论 *Dèng xiǎopíng Lǐlùn*), dan Teori Tiga Perwakilan milik Jiang Zemin (三个代表 *Sān Gè Dàibiǎo*) (Li, 2012). Dalam pertemuan Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2003 disebutkan bahwa perlu ditekankan penggunaan Teori Deng Xiaoping dan Teori Tiga Perwakilan sebagai panduan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan untuk memberantas korupsi di Tiongkok (China Daily, 2003).

Dalam tesisnya, Li (2012) menyebutkan bahwa menurut Marx, Engels, dan Lenin, korupsi disebabkan oleh sifat asli manusia, sistem pemerintahan yang buruk, dan keterbelakangan sosial budaya. Berdasarkan hal tersebut, Marx, Engels, dan Lenin menekankan perlunya pendidikan dan pembelajaran sejak dini, pengelolaan

sistem pemerintahan yang terbuka dan transparan, serta memperkuat kontrol pengawasan. Pemikiran Marx, Engels, dan Lenin kemudian dijadikan sumber teoretis pemikiran pemberantasan korupsi dan kejujuran Partai Komunis Tiongkok baik pada era pemerintahan Mao Zedong, Deng Xiaoping, maupun Jiang Zemin (Li, 2012; Luo, 2004; Wang, 2004).

Selain diilhami oleh pemikiran para pendahulunya, Hu Jintao kemudian banyak mengembangkan teori dan pemikiran pemimpin terdahulu menjadi sebuah inovasi pemikiran baru dan langkah utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Hu Jintao menggunakan salah satu gagasan konsep pemikiran politik miliknya, yaitu Pemikiran Ilmiah dalam Pembangunan sebagai dasar upaya untuk memberantas korupsi. Gagasan konsep pemikiran tersebut kemudian disetujui dalam Kongres Nasional Keenam Belas Partai Komunis Tiongkok. Dalam konsep tersebut, Hu Jintao menekankan pada prinsip “Perkembangan Ilmiah”, “Mendahulukan Rakyat”, dan “Masyarakat Harmonis” (Xing, 2009; Fewsmith, 2008). Berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, Hu Jintao kemudian mengembangkan dan menerapkannya sebagai inovasi baru dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu salah satunya melalui pemanfaatan iptek.

3.2. Praktik Pemanfaatan TIK / Internet dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Aspek dan prinsip pemberantasan korupsi Deng Xiaoping dan Jiang Zemin memiliki pengaruh yang besar dalam gagasan pemikiran pemberantasan korupsi milik Hu Jintao. Salah satu pemikiran Jiang Zemin yang masih diterapkan untuk memberantas korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih adalah prinsip mengobati dari gejala dan akarnya. Hal itu diungkapkan Hu dalam Sidang Pleno Kedua Komisi Pusat Inspeksi Disiplin ke-17 Partai Komunis Tiongkok yang dilaksanakan pada 14-16 Januari 2008 sebagai berikut:

“...真抓好今年的党风廉政建设和反腐败工作意义重大。各级纪委要坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，加强以保持党同人民群众血肉联系为重点的作风建设，加强以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建...”

“...Sangatlah penting untuk dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan dengan baik dalam gaya kerja partai tahun ini untuk membangun pemerintahan yang bersih dan jujur serta pekerjaan memberantas korupsi. Komisi Inspeksi Disiplin di semua tingkatan harus mematuhi prinsip mengobati

gejala dan akar penyebabnya, mengendalikan secara komprehensif, hukuman dan pencegahan simultan, dan penekanan pada pencegahan, (kami akan) memperkuat konstruksi gaya kerja yang menekankan pada pemeliharaan hubungan dekat antara partai dan rakyat, serta memperkuat konstruksi anti korupsi dan menjaga pemerintahan yang bersih dengan menekankan pada peningkatan sistem hukuman dan pencegahan korupsi....”

Prinsip tersebut kemudian kembali ditekankan pada Sidang Pleno Ketiga Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai Komunis Tiongkok yang dilaksanakan pada 12-14 Januari 2009 dalam ungkapan seperti berikut ini:

“全会指出·坚持用“三个代表”重要思想指导党风廉政建设和反腐败工作新的实践·既要从严治标·惩治腐败·又要着力治本·预防腐败....”

“Sidang pleno menunjukkan bahwa untuk berpegang teguh menggunakan pemikiran penting “Teori Tiga Perwakilan” untuk memandu praktik baru gaya kerja partai dan pembangunan pemerintahan yang bersih dan pekerjaan memberantas korupsi, selain itu, kita tidak hanya perlu mengobati gejala dan menghukum tindak korupsi dengan ketat, tetapi juga perlu untuk fokus pada akar permasalahan dan pencegahan korupsi....”

Pada praktiknya prinsip mengobati gejala dan akar penyebabnya, mengendalikan secara komprehensif, memberi hukuman dan pencegahan simultan, dan penekanan pada pencegahan kemudian tertuang dalam berbagai bentuk kebijakan. Wu (2010) memaparkan beberapa bentuk kebijakan tersebut di antaranya adalah, memperkuat pendidikan anti-korupsi dan ideologi, memperkuat sistem konstruksi, memperkuat pembatasan dan pengawasan operasi kekuasaan terutama kader partai, dan meningkatkan upaya penyidikan serta penanganan kasus korupsi di Tiongkok.

Hu Jintao dalam pidatonya pada Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok Ketujuh Belas yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2007 menegaskan kebijakan yang dijalankannya tersebut sebagai berikut:

“We will strictly implement the responsibility system for improving the Party’s style of work and upholding integrity. We will deepen reform, make institutional innovation, foster a culture of integrity and develop a permanent education mechanism to resist corruption and decadence, a system for combating corruption and upholding integrity and a mechanism for monitoring the exercise of power. We need to strengthen the unified management of representative offices of Party

discipline inspection commissions and government supervision departments and improve the system of inspection tours. We will do our best to ensure that leading cadres are clean and self-disciplined and that Party members and cadres are better able to resist corruption and decadence.”

Berdasarkan hasil Sidang Pleno Ketiga Komisi Pusat Inspeksi Disiplin ke-17 Partai Komunis Tiongkok, memperkuat pendidikan anti-korupsi dan ideologi dilakukan dengan menerapkan delapan syarat dari empat disiplin utama yang terutama diwajibkan bagi para kader terkemuka PKT. Lam (2006) menambahkan bahwa Komisi Pusat Inspeksi Disiplin PKT kemudian mengeluarkan lima peraturan yang melarang pejabat menggunakan kekuasaan mereka untuk terlibat dalam perdagangan. Misalnya, kader dan kerabatnya dilarang membeli saham atau berbisnis dengan perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung berada di bawah kendali mereka.

Menurut Wan dan Cai (2010), salah satu ciri pemikiran Hu Jintao dalam upaya pemberantasan korupsi adalah memanfaatkan perkembangan iptek, khususnya internet. Pada dasarnya Hu ingin menerapkan gaya pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan. Lam (2006) menjelaskan bahwa sejak paruh kedua merebaknya wabah SARS di Tiongkok yakni sekitar tahun 2003, kepemimpinan Hu Jintao dan Wen Jiabao mengemukakan janjinya bahwa, “rakyat memiliki hak untuk tahu”. Hal itu dilakukan dengan bersikap transparan dan memperbolehkan media massa maupun jaringan internet untuk menyebarkan berita-berita kemasyarakatan. Namun tak lama berselang, pada awal tahun 2004 Departemen Publisitas dan unit-unit lain mulai menindak koran-koran liberal, stasiun TV, serta situs-situs di internet yang berani mengekspos “sisi gelap masyarakat” atau yang menantang ortodoksi partai maupun paham sosialis.

Lebih lanjut Lam (2006) dalam bukunya yang berjudul *Chinese Politics in the Hu Jintao Era: New Leaders, New Challenge* juga menyebutkan beberapa kasus penangkapan rakyat yang berani mengekspos kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Misalnya, Huang Jingao, seorang pimpinan partai dari Kabupaten Lianjiang di luar Fuzhou, Provinsi Fujian, yang menuliskan melalui media E-mail bahwa dia telah mencoba untuk menghentikan proyek pembangunan perkotaan yang merupakan produk kolusi antara developer *real estate* dan pejabat korup. Ada juga Li Xinde, seorang pensiunan tentara asal Shandong, yang ditangkap karena membuat situs web www.yuluncn.com

untuk mewadahi laporan dari petani dan pekerja yang ingin mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat lokal.

Seiring berjalannya waktu, kendati pemerintah RRT terus memperketat sistem sensor dalam penggunaan internet oleh masyarakat, pengembangan pemanfaatan internet untuk berbagai bidang kehidupan juga terus dilakukan. Hu Jintao sendiri tampaknya semakin menyadari pentingnya pemanfaatan iptek berupa penggunaan media dan internet sebagai salah satu alat untuk memberantas kasus korupsi di Tiongkok. Chen dan Zhao (2011) mengatakan bahwa pada Sidang Pleno Kelima Komisi Pusat Inspeksi Disiplin ke-17 Partai Komunis Tiongkok yang dilaksanakan pada 11-13 Januari 2010, Hu Jintao kembali menekankan pentingnya membangun sistem pemberantasan korupsi. Pada kesempatan itu untuk pertama kalinya Ia mengusulkan tugas penting meningkatkan pemanfaatan iptek dalam memberantas korupsi. Berikut ini adalah pernyataan Hu Jintao terkait hal tersebut:

“当前，要结合实际，下大气力抓好以下六项工作：……（五）积极推进党务公开特别是基层党务公开工作，落实党员的知情权、参与权、选举权、监督权。（六）拓宽群众参与反腐倡廉工作渠道，加强反腐倡廉舆情网络信息的收集、研判和处置，积极回应社会关切。”

”Saat ini, perlu untuk menggabungkan realitas dan melakukan upaya besar untuk melakukan enam tugas berikut: 5) Secara aktif mendorong keterbukaan urusan partai, terutama kerja keterbukaan urusan partai di tingkat dasar, dan melaksanakan hak anggota partai untuk mengetahui, berpartisipasi, memilih, dan mengawasi. 6) Memperluas saluran bagi massa untuk berpartisipasi melalui pekerjaan memberantas korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih, memperkuat pengumpulan, penelitian, penilaian, dan penindakan informasi daring mengenai pemberantasan korupsi dan pembangunan pemerintah yang bersih, dan secara aktif menanggapi masalah sosial.”

Pidato tersebut menunjukkan langkah baru yang diambil Hu dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu melalui media daring. Tidak hanya itu, Hu bahkan menekankan perlunya keterbukaan urusan partai dan perlunya partisipasi rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi di Tiongkok terutama melalui informasi-informasi yang terdapat secara daring. Hal tersebut sesuai dengan gagasan Hu Jintao, yaitu Pandangan Ilmiah dalam Pembangunan dengan menonjolkan prinsip Pengembangan Ilmiah dan Mendahulukan Rakyat.

Berhubungan dengan pandangan Hu Jintao, Yang Senlin (2007) kemudian menjelaskan bahwa apa yang disebutnya sebagai “ilmu pengetahuan dan teknologi anti korosi”. Ungkapan itu merupakan sebuah upaya untuk mengintegrasikan sarana teknologi tinggi modern dan konsep manajemen ilmiah, dan memperkenalkan sarana ilmiah dan teknologi dengan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi jaringan sebagai konten utama ke dalam pekerjaan pemberantasan korupsi dan pembangunan pemerintahan yang bersih (Chen & Zhao, 2011).

Beberapa sarana teknologi yang digunakan untuk membantu upaya pemberantasan korupsi adalah komputer, internet, dan situs web tertentu seperti Baidu dan Weibo yang memungkinkan rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Menurut Tian (2019), orang-orang lebih memilih percaya pada rumor dan informasi yang tersebar di media daring seperti Weibo daripada apa yang dikatakan pemerintah. Penggunaan sosial media dan internet dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pemikiran anti-korupsi, termasuk untuk mengekspos kasus-kasus korupsi yang dilakukan terutama oleh para pejabat senior yang selama ini tidak terpantau sehingga dapat diketahui oleh khalayak luas. Adanya suara mayoritas rakyat tersebut dapat membantu pemerintah untuk memberantas korupsi yang merugikan negara.

Pemanfaatan sarana teknologi tersebut juga diterapkan oleh organisasi-organisasi pemerintahan di seluruh tingkatan. Misalnya, pada tanggal 4 Mei 2009 Kejaksaan Agung mengumumkan revisi “Peraturan Pelaporan Kejaksaan Rakyat” dengan menggunakan internet sebagai salah satu media pelaporan. Pada 28 Oktober 2009, Kementerian Pengawasan Komisi Pusat Inspeksi Disiplin juga meluncurkan situs web laporan inspeksi disiplin nasional (Chen & Zhao, 2011). Adanya pemanfaatan iptek terutama internet tersebut jelas mempermudah sistem pelaporan, verifikasi kasus dan informasi, serta pengawasan terhadap pelanggaran berupa tindak korupsi dalam badan pemerintahan.

3.3. Efektivitas Pemanfaatan Ilmu dan Teknologi Terutama Internet dalam Pemberantasan Korupsi

Kegigihan Hu Jintao dalam melakukan pemberantasan korupsi di Tiongkok sesungguhnya telah terlihat sejak awal kepemimpinannya. Sejumlah upayanya telah berhasil mengungkap kasus korupsi besar yang dilakukan oleh para pejabat berpangkat tinggi di Tiongkok. Misalnya, pada tahun 2004 terdapat penangkapan Dewan Komisaris Bank Konstruksi Cina

cabang Hongkong, Liu Jinbao, karena dugaan penipuan dan korupsi. Selanjutnya pada tahun 2005 terdapat penangkapan mantan ketua Bank Konstruksi Cina, Zhang Enzhao, karena dugaan penyalahgunaan dan penyimpangan bisnis (Lam, 2006).

Fewsmith (2008) menambahkan bahwa pada tahun 2006, Hu berhasil memberhentikan Liu Zhihua sebagai wakil walikota Beijing, Wang Yeshou sebagai wakil komandan Angkatan Laut, He Minxu sebagai wakil gubernur di provinsi Anhui, dan Li Baojin, sebagai presiden Kejaksaan Tianjin karena melakukan tindak korupsi. Menurut Tian (2019), selama tahun 2005-2006, kejaksaan Tiongkok telah berhasil menyelidiki, menahan, dan mendakwa lebih dari 6.000 pejabat. Salah satu pejabat yang ditangkap dan diberhentikan dari jabatannya adalah Chen Liangyu, seorang pejabat Biro Politik Partai Komunis Tiongkok dan Komite Sentral karena terlibat penyalahgunaan kekuasaan dan penerimaan suap hingga £170,000 atau sekitar 1.498.227 Yuan (Tian, 2019).

Intensifikasi pemberantasan korupsi yang digagas Hu dengan memanfaatkan iptek khususnya internet, juga membuahkan hasil yang cukup signifikan. Zhang Weiyang (2013) dalam artikelnya menjelaskan bahwa, sejak Hu Jintao mencanangkan untuk memanfaatkan iptek khususnya internet dalam upaya pemberantasan korupsi, artikel yang mengandung kata “anti korupsi” dalam Baidu News meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2003, terdapat total 11.900 artikel, meningkat menjadi 76.200 artikel pada tahun selanjutnya, 73.330 artikel pada 2005, 106.000 artikel pada 2006, 246.000 artikel pada 2010, dan 2012 telah mencapai 861.000 artikel (Zhang, 2013).

Tidak hanya itu, situs buatan Biro Pencegahan Korupsi Nasional Tiongkok pun sempat tidak bisa diakses akibat banyaknya laporan dari publik yang masuk ketika pertama kali diluncurkan pada bulan Desember tahun 2007 (Bergsten, et al., 2008). Dalam praktiknya, upaya pemberantasan korupsi melalui pemanfaatan sarana ilmu dan teknologi khususnya media internet, telah berhasil mengekspos beberapa kasus korupsi di berbagai instansi Tiongkok. Tercatat di antaranya, sejak tahun 2008 terungkap insiden “Zero Tax”, Insiden Dong Feng di kota Xuzhou, Insiden Melonjaknya Harga Rokok di Nanjing, dan beberapa kasus korupsi di instansi pengelola sistem penerbangan sipil Tiongkok (Chen & Zhao, 2011).

Sejak tahun 2002-2007, terdapat 677.924 kasus korupsi yang dilaporkan dan pemerintah telah menghukum lebih dari 100.000 pejabat korup setiap tahunnya (Kelihier & Wu, 2016). Yang Minzhi (2012)

menambahkan bahwa, berdasarkan laporan kerja yang diserahkan oleh Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin kepada Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18 menunjukkan bahwa sejak November 2007 hingga Juni 2012, terdapat total 643.759 kasus yang diajukan oleh badan-badan inspeksi dan pengawasan disiplin nasional, 639.068 kasus ditutup, dan 668.429 orang diberi sanksi disiplin dan politik partai (Doyon, 2013). Pada 2007, kejaksaan melaporkan bahwa kerugian yang berhasil dipulihkan rata-rata lebih dari 35. 800 dolar AS atau sekitar 273.000 Yuan per kasus (Wedeman, 2012).

Meskipun sejak tahun 1998 hingga 2012 rata-rata angka Indeks Persepsi Korupsi Tiongkok masih berada di angka 35, namun tidak bisa dipungkiri bahwa upaya pemberantasan korupsi yang diterapkan di era Hu Jintao membawa hasil yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan era pemerintahan pemimpin-pemimpin pendahulunya. Zhao (2014) menyebutkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok, sejak tahun 2003 hingga 2010, tingkat kepuasan masyarakat terhadap efektivitas upaya pemberantasan korupsi meningkat dari 51.9% hingga 70.6% (Tang, et al., 2018). Angka-angka tersebut menjadi petunjuk nyata tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi di era Hu Jintao yang memanfaatkan iptek, terutama pemanfaatan jaringan internet di dalamnya.

SIMPULAN

Tindak korupsi memiliki sejarah yang panjang di Tiongkok. Sejak era kedinastian hingga masa Tiongkok modern, tindak korupsi di Tiongkok terus berkembang pesat. Sejak diberlakukannya kebijakan reformasi- keterbukaan pada tahun 1978, tingkat korupsi di Tiongkok terus meningkat hingga Tiongkok menjadi salah satu negara paling korup di dunia. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan pemerintah RRT sejak awal kemerdekaan Tiongkok. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan belum membawa hasil yang cukup signifikan. Bahkan pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, kerugian ekonomi akibat korupsi mencapai 14,9% dari PDB Tiongkok atau sekitar 181 milyar dollar AS. Oleh karena itu, Hu Jintao yang naik ke tampuk kepemimpinan PKT dan RRT pada awal abad-21 yakni di tahun 2002, harus menerima kenyataan bahwa korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar pada era pemerintahannya.

Dalam memberantas korupsi, Hu Jintao menggunakan gagasan pemikiran pemberantasan korupsi Marxisme-Leninisme, pemikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping, dan Teori Tiga Perwakilan milik Jiang Zemin sebagai dasar dari pemikiran

pemberantasan korupsi. Hu Jintao juga menggunakan salah satu gagasan pemikiran politik miliknya, yaitu Pandangan Ilmiah dalam Pembangunan sebagai dasar upaya untuk memberantas korupsi. Hu Jintao kemudian mengembangkan teori, pemikiran, dan upaya-upaya pemimpin terdahulu menjadi sebuah kebijakan pemberantasan korupsi yang inovatif. Pemanfaatan kemajuan TIK berupa komputer, internet, dan situs web tertentu seperti Baidu dan Weibo menjadi modus utama dalam pemberantasan korupsi, dan kemudian terbukti merupakan langkah yang efektif.

Berbeda dengan upaya pemberantasan korupsi para pendahulunya, pemberantasan korupsi di Tiongkok di awal abad-21 tersebut, memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Melalui komputer dan internet yang penggunaannya di Tiongkok semakin luas, telah membuat masyarakat dapat mengakses informasi mengenai korupsi dan bahkan ikut melaporkan tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Bersamaan dengan itu Hu Jintao sebagai pemimpin rezim saat itu juga terus menegaskan bahwa, pemberantasan korupsi sebagai salah satu tugas penting partai dan masyarakat. Setelah dicanangkan pemanfaatan iptek terutama internet dalam upaya pemberantasan korupsi, jumlah artikel dan kasus korupsi terlapor di Tiongkok terus meningkat setiap tahunnya. Hu Jintao juga menegatkan pengawasan dan hukuman terhadap para koruptor sehingga jumlah pejabat korup yang dihukum setiap tahunnya juga meningkat.

Peningkatan jumlah kasus yang terlapor membuktikan bahwa pemanfaatan sarana iptek sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi cukup efektif dan berhasil secara cukup signifikan dibandingkan dengan era pemerintahan sebelum Hu Jintao. Tidak hanya itu, peningkatan tersebut juga berdampak pada semakin tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap efektivitas upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam periode tahun 2003 hingga tahun 2010.

Dengan mempertimbangkan temuan ini, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan komunitas untuk merancang strategi yang berkelanjutan dalam mendukung kewirausahaan etnik. Hal ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga melestarikan keberagaman budaya yang merupakan aset berharga bagi Indonesia. Kesimpulan ini menegaskan bahwa kewirausahaan etnik tidak hanya berperan dalam konteks ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam pelestarian dan penguatan identitas budaya komunitas pribumi dan minoritas di Indonesia.

REFERENSI

- Alfiyah, N. I. (2018). *Kebangkitan ekonomi china yang tidak sejalan dengan kesejahteraan buruh (perbaikan taraf hidup buruh pada masa pemerintahan hu jintao)*. PUBLIC CORNER, 13(2), 46-59.
- Asnia, A., & Ningsih, T. W. R. (2023). Etnis tionghoa di indonesia dalam pandangan sejarah (studi representasi pada buku teks pelajaran sejarah indonesia sma kurikulum 2013). *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 6(2), 193-204.
- Battiste, M. (2013). *Decolonizing education: Nourishing the learning spirit*. UBC Press.
- Branigan, T. (2012). *China's Hu Jintao warns congress corruption could cause fall of state*. <https://www.theguardian.com/world/2012/nov/08/china-hujintao-warning-congress-corruption> (Diakses pada 17 September 2023)
- Brown, K. (2014). *Carnival china: china in the era of hu jintao and xi Jinping*. Imperial College Press
- CCDI. (2013). *中国共产党第十七届中央纪律检查委员会第二次全体会议公报 (Komunike Sidang Paripurna Kedua Komisi Pusat Ketujuh Belas untuk Inspeksi Disiplin Partai Komunis Tiongkok)*. https://www.ccdi.gov.cn/xxgk/hyzl/201307/t20130726_114151.html (Diakses pada 17 September 2023)
- Chan, K. S., Dang, V. Q. T., Li, T. (2019). *The evolution of corruption and development intransitional economies: evidence from china*. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.09.001>
- Chen, T. H.-E., & Chen, W.-H. C. (1953). The “three-anti” and “five-anti” movements in communist china. *Pacific Affairs*, 26(1), pp. 3–23. <https://doi.org/10.2307/2752900>
- Chen, Zhenghong., Zhao, Qiang. (2008). *网络反腐：借助高科技手段惩治腐败的利剑 (Antikorupsi di Internet: pedang tajam untuk menghukum korupsi dengan sarana teknologi tinggi)*. Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang. <https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JZGC201129106.htm> (diakses pada 21 Agustus 2023)
- Cheng, T. J., DeLisle, J., Brown, D. (2006). *China under hu jintao: opportunities, dangers, and dilemmas*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Cheng, T. J. (2006). *Information technology in china: a double-edged sword*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

- China Daily. (2003). *CCP vows to fight corruption in coming years*. http://www.chinadaily.com.cn/en/home/2003-01/29/content_153284.htm.
- China Daily. (2005). *Hu offers systematic cure to corruption*. http://www.chinadaily.com.cn/english/home/200501/12/content_407995.htm (Diakses pada 17 September 2023)
- China Daily. (2006). *Anti-corruption drive an arduous task*. http://www.chinadaily.com.cn/english/cndy/2006-01/07/content_510054.htm (Diakses pada 17 September 2023)
- China Daily. (2006). *President Hu Jintao calls for corruption fight*. http://www.chinadaily.com.cn/english/home/200601/08/content_510280.htm (Diakses pada 17 September 2023)
- China Daily. (2006). *China takes aim at corruption*. http://www.chinadaily.com.cn/english/home/200601/09/content_510503.htm (Diakses pada 17 September 2023)
- D'Amico, Nicholas. (2015). Corruption and economic growth in china: an emirical analysis. *Senior Honors Projects*. 78. <http://collected.jcu.edu/honorspapers/7> (Diakses pada 6 Agustus 2023)
- Davis, D. K. (2008). *Modern world leaders: hu jintao*. Infobase Publishing
- Deng, X., Zhang, L., Leverentz, A. (2010). Official corruption during china's economic transition: historical patterns, characteristics, and government reactions. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 26(1).72–88. 10.1177/1043986209350302.
- Doyon, J., & Jayaram, N. (2013). *A new impetus for the fight against corruption*. *China Perspectives*, 2(94), pp. 74–75. <http://www.jstor.org/stable/24055558>
- Dugis, V. M. (2015). Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Strategik. *Global & Strategis*, 9(1), 1-18.
- Ewing, R.D. (2003). *Hu Jintao: the making of a chinese general secretary*. *The China Quarterly*. 173, 17-34. 10.1017/S0009443903000032
- Falevi, Y., Zain, M. A., Bhaswara, N. G., Rafli, M., & Putra, A. S. (2023). Implikasi penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(3), 105-113.
- Katimin, H. (2020). Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam menentukan hukuman mati pada tindak pidana korupsi. *Sasi*, 26(1), 39-51.
- Fang, Qiang., & Li, Xiaobing. (2019). *Corruption and anticorruption in modern china*. United Kingdom: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
- Fewsmith, J. (2008). *China since tiananmen: from deng xiaoping to hu jintao*. Cambridge University Press
- Fewsmith, J. (2003). Chinese Politics under Hu Jintao: Riding the Tiger of Politics and Public Health,. *Problems of Post-Communism*. 50(5). Pp. 14-21. 10.1080/10758216.2003.11656051
- Guo, Y. (2008). Corruption in transitional china: an empirical analysis. *The China Quarterly*, 194, 349–364. <https://doi.org/10.1017/S03057410080>
- Gong, T. (1997). Forms and characteristics of china's corruption in the 1990s: change with continuity. *Communist and Post-Communist Studies*, 30(3),277-288. [https://doi.org/10.1016/S0967-067X\(97\)00008-1](https://doi.org/10.1016/S0967-067X(97)00008-1)
- Gong, T. (2004). Dependent judiciary and unaccountable judges: judicial corruption in contemporary china. *China Review*. 4(2). Pp. 33–54. <http://www.jstor.org/stable/23461883>
- GOV.CN. n.d. 中国共产党第十七届中央纪律检查委员会第三次全体会议公报 (*komunike sidang paripurna ketiga komisi pusat ketujuh belas untuk inspeksi disiplin partai komunis tiongkok*). http://www.gov.cn/test/200506/27/content_9929.htm (Diakses pada 17 September 2023)
- Hao, Y., & Johnston, M. (1995). Reform at the crossroads: an analysis of chinese corruption. *Asian Perspective*, 19(1), 117–149. <http://www.jstor.org/stable/42704062>
- He, Zengke. (2002). Corruption and anti-corruption in reform china. *Communist and Post Communist Studies* 33, 243–270. [https://doi.org/10.1016/S0967067X\(00\)00006-4](https://doi.org/10.1016/S0967067X(00)00006-4)
- Hou, J. W. (2011). Economic reform of China: Cause and effects. *The Social Science Journal*, 48(3), 419-434. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2011.06.009>
- Hou, Xiaojia. (2019). *Connection, corruption, and confrontation*. Lake Weishan. United Kingdom: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
- Huang, Yanzhong. (2006). *Is the chinese state apparatus being revamped*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- KBBI. (2020). *Kamus besar bahasa indonesia* (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi> (Diakses pada 9 Agustus 2023)

- Keliher, M., & Wu, H. (2016). Corruption, anticorruption, and the transformation of political culture in contemporary china. *The Journal of Asian Studies*, 75(1), 5–18. 10.1017/S002191181500203X
- Kenton, W. (2021). *Corruption perceptions index (CPI)*. <https://www.investopedia.com/terms/c/corruption-perception-index> (Diakses pada 7 Oktober 2023)
- Ko, K., & Weng, C. (2012). Structural Changes in Chinese Corruption. *The China Quarterly*, 211, 718-740. <http://www.jstor.org/stable/23501> (Diakses pada 5 Agustus 2023)
- Lam, W. W. L. (2006). *Chinese politics in the hu jintao era: new leaders, new challenges*. United States of America: An East Gate Book.
- Lee, T. C. (2018). Pernicious custom? Corruption, culture, and the efficacy of anti-corruption campaigning in China. *Crime Law Soc Change* (2018) 70: pp. 349–361 <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9735-x>
- Li, Minguo. (2012). 胡锦涛反腐倡廉建设思想研究 (*Kajian tentang pemikiran hu jintao dalam memerangi korupsi dan menganjurkan kejujuran*). <https://kns.cnki.net/kcms/detail/>.
- Li, Xiaobing. (2019). *Anticorruption policy and party politics: the lost political battle and the fate of the gmd*. United Kingdom: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
- Luo, Z. (2010). 中国共产党第十七届中央纪律检查委员会第五次全体会议公报 (*komunike sidang pleno kelima komisi pusat ketujuh belas untuk inspeksi disiplin partai komunis tiongkok*) <https://jwjc.shu.edu.cn/info/1081/1852.htm> (Diakses pada 17 September 2023)
- Mamychev, A. Y., et al. (2018). *Anticorruption policy in modern China: basic principles and direction*. Revista San Gregorio 2018. eISSN: 2528-7907
- Mutia, R Tuty Nur. (2015). *Diplomasi tanpa kehilangan muka: peran konsep mianzi di balik normalisasi hubungan diplomatik tiongkok-indonesia tahun 1990*. Serat Alam Media.
- NDTV. (2012). *China's Hu Jintao says corruption threatens state, promises reform*. <https://www.ndtv.com/world-news/chinas-hu-jintao-says-corruption-threatens-state-promises-reform-504029> (Diakses pada 17 September 2023)
- Pei, Mixin. (2007). *Corruption threatens China's future. Policy Brief*. 55. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace. www.carnegieendowment.org/files/pb55_pei_china_corruption_final.pdf (Diakses pada 6 Agustus 2023)
- People Republic of China in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. (2007). *Full text of hu jintao's report at 17th party congress*. <http://www.chinese-embassy.org.uk/eng/zywl/2007/t376863.htm> (Diakses pada 17 Oktober 2023)
- Pletcher, K. (2020). *Opium wars*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Opium-Wars> (Diakses pada 17 September 2023)
- Pope, J. (2003). *Strategi memberantas korupsi: elemen sistem integritas nasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Purba, R. I. (2019). *Kepatuhan Jepang dan tiongkok terhadap rezim internasional mengenai penanganan kejahatan korupsi dan pencucian uang sebagai sarana peningkatan kekuatan ekonomi negara (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science)*.
- Root, Hilton. (1996). Corruption in china: has it become systemic? *Asian Survey*, 36. 741-757. 10.1525/as.1996.36.8.01p0155r .
- Schauseil, W., Zúñiga, N., & Jackson, D. (2019). *Media and anti-corruption*. Transparency International. <http://www.jstor.org/stable/resrep20465>
- Sun, Y. (2005). *Corruption, growth, and reform: the chinese enigma*. http://faculty.nps.edu/relooney/00_New_112.pdf (Diakses pada 24 September 2023).
- Sugiyatmo, A., & Sumanto, L. (2024). Perbandingan hukum tentang hukuman pidana mati di indonesia dengan republik rakyat china (tiongkok). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8042-8057.
- Tang, N., Ding, Z., & Xu, Y. (2018). Corruption and anti-corruption research in china: a critical review of chinese top journal publications (1989–2017). *Chinese Public Administration Review*, 9(2). 79-98. <http://dx.doi.org/10.22140/cpar.v9i2.167>
- Tian, Xiansheng. (2019). *Hu jintao's anticorruption action (or non-action): the bo xilai case and after*. The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
- Transparency International. <https://www.transparency.org/en/about> (Diakses pada 7 Oktober 2023)
- Wan, Bibo & Cai, Jing. (2010). 胡锦涛反腐倡廉思想简论 (diskusi singkat tentang pemikiran hu jintao dalam memerangi korupsi dan menganjurkan kejujuran). *Journal of Yangzhou University (Humanities & Social Sciences)*, 14(6). <https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YZDR201006002.htm> (Diakses pada 5 Agustus 2021)
- Wang, Gang. (2007). 党章的地位作用与反腐倡廉的基础 (*peran konstitusional partai dan landasan pemberantasan korupsi*). https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-JZYK200701004.htm (Diakses pada 10 Oktober 2021)
- Watts, J. (2011). *Chinese president hu jintao's warning as communist party celebrates 90 years*. <https://www.theguardian.com/world/2011/jul/01/chinese>

- president-corruption-communist-party (Diakses pada 17 September 2023)
- Wedeman, A. (2004). The intensification of corruption in china. *The China Quarterly*, 180. Pp. 895-921. <http://www.jstor.org/stable/20192410> (Diakses pada 6 Agustus 2021)
- Wedeman, A. (2012). Growth and corruption in china. *Critical Readings on the Communist Party of China*, 11(2). https://www.chinacenter.net/2012/china_currents/11-2/growth-and-corruption-in-china/# (Diakses pada 13 Agustus 2021)
- White, G. (1996). Corruption and the transition from socialism in china. *Journal of Law and Society*, 23(1), 149-169. <https://doi.org/10.2307/1410472>
- Wang, Hongxia. (2004). 中共三代领导人的反腐败思想初探 (Kajian pendahuluan pemikiran antikorupsi tiga generasi pemimpin partai komunis china). *J. Chang chun Inst. Tech. (Soc. Sci. Edi.)*, 5(4). https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-CGCS200404003.htm (Diakses pada 14 Agustus 2023)
- Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2019). Upaya tiangkok dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antardaerah pada masa kepemimpinan jiang zemin dan hu jintao. *Nation State: Journal of International Studies*, 2(2), 105-122.
- Wu, C. (2016). The role of a regulatory enforcement system against corruption in China. In *Regulating Government Ethics: An Underused Weapon in China's Anti-Corruption Campaign* (pp. 14-62). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316402214.003>
- Wu, Gaoqing. & Li, Liu. (2011). 建党90年来反腐倡廉法律制度体系的建立与完善 (Pembentukan dan perbaikan sistem hukum antikorupsi dan pemerintahan bersih dalam 90 tahun terakhir sejak berdirinya partai). Institute of Law, Zhejiang Industrial and Commercial University. https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-LZWH201102008.htm (Diakses pada 13 Agustus 2023)
- Wu, Jiuzhan. (2010). 论胡锦涛反腐倡廉建设的新思路 (Pemikiran baru hu jintao tentang memerangi korupsi dan pemerintahan yang bersih). *Research Center, Guangzhou University. Guangzhou, Guangdong*. <https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GZDX201012003.htm> (Diakses pada 13 Agustus 2021)
- Wu, Yiping., & Zhu, Jiangnan. (2011). Corruption, anti-corruption, and intercounty income disparity in China. *The Social Science Journal*, 48(3), 435-448. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2011.05.001>
- Xing, G. (2009). Hu Jintao's political thinking and legitimacy building: a post-marxist perspective. *Asian Affairs*, 36(4). Pp. 213-226. <http://www.jstor.org/stable/27748574>
- Xu, Lanbin. (2012). 防范“四种危险”：高校从源头遏制腐败的重要抓手- 兼论高校党员要自觉增强居安思危的忧患意识 (Cegah “empat bahaya” : cara penting perguruan tinggi dan universitas membasmi korupsi dari sumbernya - juga atas kesadaran anggota partai di perguruan tinggi dan universitas untuk bersiap menghadapi bahaya di masa aman). *Journal of Jiangxi Agricultural University*, 11(3). https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-JNDS201203026.htm (Diakses pada 10 Oktober 2023)
- Xu, Senlin. (2008). 胡锦涛反腐败思想探析 (Analisis pemikiran antikorupsi hu jintao). *East China University of Science and Technology*. Shanghai. <https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SDXB200805015.htm> (Diakses pada 5 Agustus 2021)
- Xu, Y., Jiao, L., Xu, R., Feng, Q., Wang, F., Jiang, J., & Chen, C. (2018). The Process and Characteristics of Psychological Kidnapping: An Indigenous Model of Corruption in China. *Journal of Pacific Rim Psychology*, 12(13). <https://doi.org/10.1017/prp.2017.24>
- Yang, Dongyu. (2019). *Anticorruption in shaanxi during jiang zemin's era*. United Kingdom: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
- Yang, Zhiguo. (2019). *Crime (or No Crime) and punishment: the making of the first big case in new china and legitimation of ccp party government, 1950-1991*. The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
- Yao, Shuntian. (2002). Privilege and Corruption: The Problems of China's Socialist Market Economy. *The American Journal of Economics and Sociology*, 61(1), 279-299. <https://www.jstor.org/stable/3487748> (Diakses pada 13 Agustus 2021)
- Yeung, Irene Y. M., & Tung, Rosalie, L. (1996). Achieving business success in confucian societies: the importance of guanxi' (Connections). *Organizational Dynamics*, 25(2), 54-65. [https://doi.org/10.1016/S0090-2616\(96\)90025-X](https://doi.org/10.1016/S0090-2616(96)90025-X) (Diakses pada 13 Agustus 2023).
- Yuliantoro, N. R. (2021). *Menuju kekuatan utama dunia: sekilas politik luar negeri cina*. Ugm Press.
- Zhang, Weiying. (2012). 反腐败的两难选择 (Dilema antikorupsi). <https://chinadigitaltimes.net/chinese/269438.html> (Diakses pada 16 September 2023)

Zhu, Jiangnan. (2017). *Corruption in reform china: a multidisciplinary review*. <https://www.researchgate.net/publication/310503733> (Diakses pada 2 4 September 2023)

Zúñiga, Nieves. (2018). *China: overview of corruption and anticorruption*. *Transparency International*. <https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Country-profile-China-2018.pdf> (Diakses pada 6 Agustus 2023)